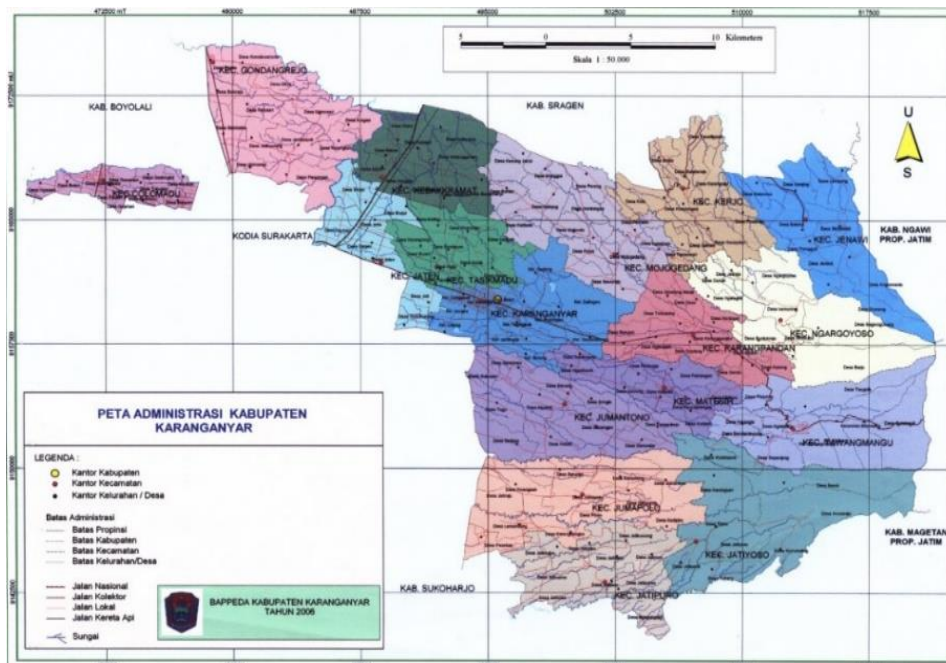


## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Karanganyar



Sumber : <https://www.karanganyarkab.go.id/>

Secara geografis wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, lebih tepatnya terletak antara  $110^{\circ} 40'' - 110^{\circ} 70''$  Bujur Timur dan  $70^{\circ} 28'' - 70^{\circ} 46''$  Lintang Selatan. Dimana berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- b. Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo
- d. Sebelah Barat : Kota Surakarta

Secara topografi Kabupaten Karanganyar sendiri merupakan daratan dan wilayah pegunungan dengan memiliki ketinggian yang bervariasi. Mulai dari 100 meter di atas permukaan laut sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kabupaten Karanganyar sendiri memiliki luas wilayah yaitu, 774,8 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,73% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut data yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar tahun 2023, Kabupaten Karanganyar memiliki jumlah penduduk sebesar 947.642 jiwa. Dengan detail yang dapat dilihat dalam table dibawah ini :

**Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Karanganyar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>WILAYAH KECAMATAN</b>	<b>PRIA</b>	<b>WANITA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kecamatan Jatipuro	17.372	17.427	34.799
2	Kecamatan Jatiyoso	20.079	19.902	39.981
3	Kecamatan Jumapolo	21.681	21.508	43.189
4	Kecamatan Jumantono	25.048	25.241	50.289
5	Kecamatan Matesih	22.528	22.669	45.197
6	Kecamatan Tawangmangu	23.859	23.732	47.591
7	Kecamatan Ngargoyoso	18.680	18.792	37.472
8	Kecamatan Karangpandan	21.875	22.390	44.265
9	Kecamatan Karanganyar	42.837	43.565	86.402
10	Kecamatan Tasikmadu	33.870	32.564	66.434

11	Kecamatan Jaten	42.026	42.735	84.761
12	Kecamatan Colomadu	37.134	38.408	75.542
13	Kecamatan Gondangrejo	45.042	44.401	89.443
14	Kecamatan Kebakramat	32.141	32.930	65.071
15	Kecamatan Mojogedang	35.419	35.819	71.238
16	Kecamatan Kerjo	19.039	19.261	38.300
17	Kecamatan Jenawi	13.784	13.884	27.668
<b>TOTAL</b>		<b>472.414</b>	<b>475.228</b>	<b>947.642</b>

## 2.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Karanganyar

Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar merupakan penyelenggara kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan urusan kesehatan seperti penyelenggaraan surveilans kesehatan, pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kabupaten Karanganyar melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar memiliki visi yaitu “**Motor Penggerak Terwujudnya Karanganyar Sehat yang Mandiri**”. Agar visi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar yang ada dapat berjalan dan terwujud dengan baik, maka perlu didukung dengan misi, yang sebagai berikut :

- 1) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan melalui kerjasama antar pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan budaya hidup sehat,
- 2) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan,
- 3) Mewujudkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel,
- 4) Mengembangkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.

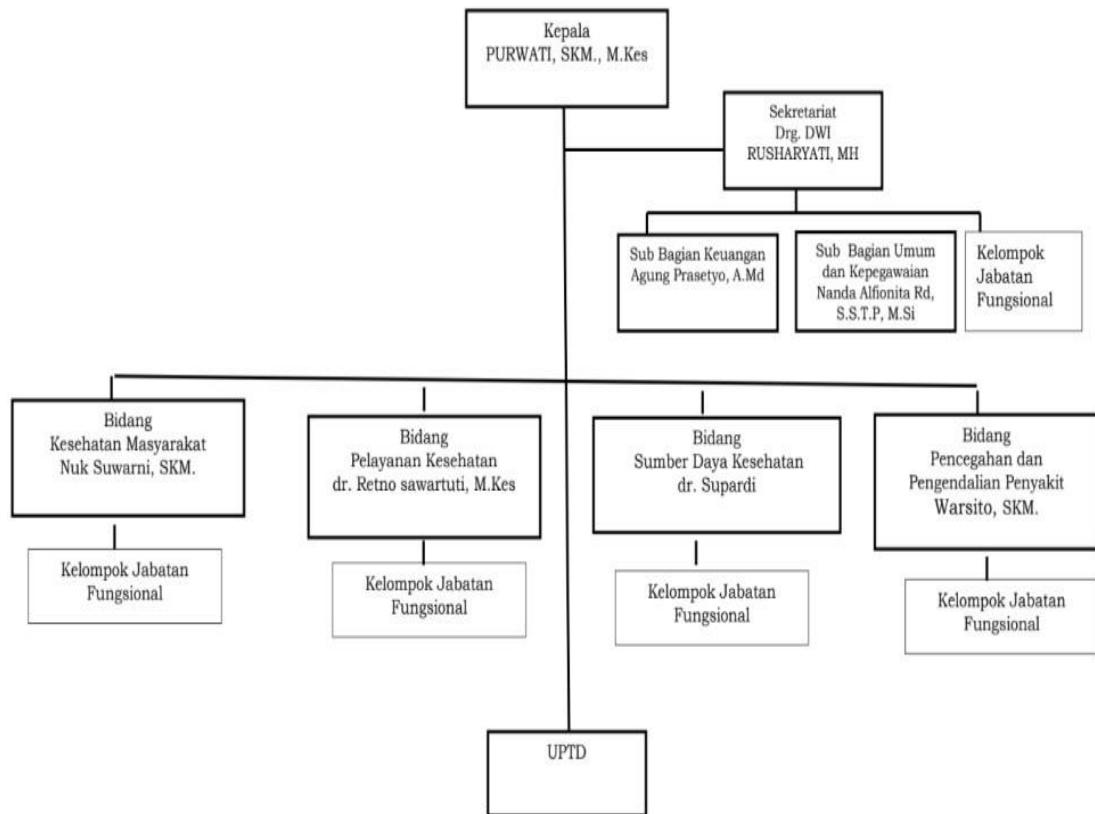
Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar memiliki tugas dan fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok : “melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Daerah”.

Kedudukan dan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

Kedudukan:

- 1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Karanganyar



### 2.3 Kebijakan penanganan HIV/AIDS

Di Kabupaten Karanganyar, kebijakan penanganan HIV/AIDS diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Kebijakan tersebut menetapkan upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS dan menyediakan panduan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS. Sejarah dan perkembangan kebijakan penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengambil tindakan

untuk mencegah dan menangani penyebaran virus HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar. (Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 2015)

Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai HIV/AIDS dan memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan tentang HIV/AIDS di sekolah-sekolah dan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga mengembangkan program pencegahan seperti distribusi kondom secara gratis dan memperluas jangkauan layanan tes HIV. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang risiko HIV/AIDS dan memudahkan akses terhadap layanan kesehatan terkait HIV/AIDS. (Herlinawati, 2019).

Kebijakan penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar juga menekankan pentingnya dukungan kepada orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengembangkan program dukungan terhadap penderita HIV/AIDS dan keluarga mereka. Program ini meliputi dukungan konseling, pengobatan, dan bantuan sosial. (Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 2019). Dalam menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga membangun jejaring kerjasama dengan organisasi-organisasi terkait HIV/AIDS seperti Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan organisasi masyarakat sipil. Dalam forum ini, mereka memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di daerah. (Herlinawati, 2019).

Dalam laporan terbaru tentang penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar, terlihat adanya peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS yang terdeteksi sejak tahun 2015. Namun, meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Karanganyar tetap berkomitmen untuk meningkatkan program penanggulangan HIV/AIDS yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan program tes HIV secara berkala dan memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai bagi orang yang terinfeksi HIV/AIDS. (Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2019)

Berdasarkan jurnal referensi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menerapkan kebijakan penanganan HIV/AIDS yang komprehensif, meliputi upaya pencegahan, pengobatan, dan dukungan terhadap orang yang terinfeksi HIV/AIDS dan keluarga mereka. Tindakan pemerintah daerah didukung oleh berbagai lembaga dan organisasi terkait HIV/AIDS yang bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membantu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai. Meskipun terjadi lonjakan jumlah penderita HIV/AIDS yang terdeteksi, Pemerintah Kabupaten Karanganyar tetap berkomitmen untuk meningkatkan program penanggulangan HIV/AIDS untuk mencegah serta menangani penyebaran HIV/AIDS di daerah tersebut.

Sejarah dan perkembangan kebijakan penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar dapat ditelusuri mulai dari awal munculnya kasus HIV/AIDS di daerah tersebut. Dalam dua dekade terakhir, pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai memperhatikan masalah ini sebagai sebuah krisis kesehatan masyarakat yang

memerlukan intervensi strategis. Awalnya, pendekatan yang diambil lebih bersifat reaktif daripada preventif, mirroring tren kebijakan nasional dan global pada waktu itu. Intervensi awal umumnya berfokus pada perawatan medis dan penanggulangan darurat, termasuk pendistribusian obat antiretroviral (ARV). Pendekatan ini sejalan dengan apa yang disarankan oleh PBB dalam 'Global Report on the AIDS Epidemic' yang menekankan peran ARV dalam pengobatan dan pencegahan HIV/AIDS (UNAIDS, "Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2013").

Namun, selama pertengahan tahun 2010-an, ada sebuah pergeseran paradigmatik dalam kebijakan penanganan HIV/AIDS. Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai mengadopsi model yang lebih komprehensif yang tidak hanya fokus pada pengobatan medis, tetapi juga pada pencegahan, edukasi, dan mitigasi dampak sosial-ekonomi dari epidemik ini. Pendekatan multi-dimensi ini diakui oleh banyak pakar dan badan internasional sebagai strategi yang lebih efektif dalam menangani HIV/AIDS (Lancet, "HIV and related infections in prisoners," 2016). Di Kabupaten Karanganyar, ini berarti melibatkan berbagai *Stakeholders*, mulai dari lembaga pemerintah, LSM, hingga komunitas lokal. Program seperti pendidikan seksual komprehensif di sekolah-sekolah dan pelibatan komunitas dalam program outreach telah diinisiasi sebagai bagian dari strategi ini.

Di sisi penelitian dan inovasi, Kabupaten Karanganyar juga menjadi subyek dari beberapa studi akademis yang berusaha memahami dinamika lokal dari epidemik HIV/AIDS. Sebagai contoh, sebuah penelitian dari universitas lokal menunjukkan bahwa meski ada peningkatan akses ke obat ARV, faktor-faktor seperti stigma dan diskriminasi masih menjadi hambatan utama dalam upaya



penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar (*Journal of Health Policy*, "Barriers to HIV Treatment: A Review of Socioeconomic and Cultural Factors," 2017). Studi ini telah mempengaruhi kebijakan daerah dalam menangani masalah stigma dan diskriminasi melalui pendidikan publik dan reformasi hukum.

Secara keseluruhan, perkembangan kebijakan penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar menunjukkan sebuah evolusi dari pendekatan yang lebih medis-centric menjadi lebih inklusif dan berbasis komunitas, seiring dengan semakin kompleks dan multi-dimensi nya pandangan terhadap HIV/AIDS sebagai sebuah isu kesehatan masyarakat yang saling terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya.